

INDIKATOR

KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 2022



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MUARA ENIM**

INDIKATOR

KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR
2022



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MUARA ENIM**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 2022

ISSN/ISBN: 2797-3050

Katalog: 4102004.1612

No Publikasi: 16120.2214

Ukuran Buku: 17,6 cm x 25,0 cm

Jumlah Halaman: xii+82 halaman

Naskah:

BPS Kabupaten Muara Enim

Penyunting:

BPS Kabupaten Muara Enim

Desain Kover oleh:

BPS Kabupaten Muara Enim

Ilustrasi Kover:

Gapura Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Penerbit:

©BPS Kabupaten Muara Enim

Pencetak:

BPS Kabupaten Muara Enim

Sumber Ilustrasi:

Canva.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 2022

Pengarah : Edi Subeno

Penanggung Jawab : Lahmodin Oktanata

Editor : Haryanto P. Situmeang

Penulis : Haryanto P. Situmeang

Tata Letak/Draft : Haryanto P. Situmeang

Design Cover : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

<https://balikab.bps.go.id>



KATA PENGANTAR

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 2022 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muara Enim yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Penukal Abab Lematang Ilir antar waktu dan perbandingannya antar kecamatan. Data yang digunakan bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Sensus Penduduk 2020 serta data dari Kementerian Pendidikan.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Muara Enim Desember 2022
Kepala BPS Kabupaten Muara Enim



Edi Subeno, S.E., M. Si

DAFTAR ISI

	Halaman
TIM PENYUSUN.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I ANALISIS	1
BAB II KEPENDUDUKAN	5
BAB III KESEHATAN	15
BAB IV PENDIDIKAN	23
BAB V KETENAGAKERJAAN	35
BAB VI TARAF DAN POLA KONSUMSI	45
BAB VII PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN	53
BAB VIII KEMISKINAN	65
BAB IX SOSIAL LAINNYA	71
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	79

<https://malikab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 2017-2021	7
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 2018-2021.....	8
Tabel 2.3	Indikator Demografi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 2017-2021.....	11
Tabel 2.4	Persentase Wanita Berumur 15-49 tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Jenis Alat/Cara KB, 2020 dan 2021.....	14
Tabel 3.1	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir, 2020-2021.....	22
Tabel 3.2	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat, 2020 dan 2021.....	22
Tabel 6.1.	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran, 2020 - 2021.....	48
Tabel 6.2.	Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita dan Indeks Gini, 2019-2021	49
Tabel 6.3.	Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari, 2019-2021	51
Tabel 7.1.	Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 2019 dan 2021.....	57
Tabel 7.2.	Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Fasilitas Perumahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 2019-2021.....	62

Tabel 7.3.	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 2019 - 2021.....	63
Tabel 8.1.	Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 2019 -2022	68
Tabel 8.2.	Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 2018-2022	69

<https://palikab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 2021.....	10
Gambar 2.2. Persentase Wanita yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Umur Perkawinan Pertama, 2020 dan 2021.....	12
Gambar 4.1. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas, 2016-2021.....	26
Gambar 4.2. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (tahun), 2017-2021.....	27
Gambar 4.3. Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang dimiliki, 2019-2021	28
Gambar 4.4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Menurut Kelompok Umur, 2017-2021.....	30
Gambar 4.5. Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Menurut Tingkat Pendidikan , 2021.....	31
Gambar 4.6. Perkembangan Rasio Murid-Guru Tahun 2018-2021	33
Gambar 4.7. Perkembangan Rasio Murid-Sekolah Tahun Ajaran 2018-2021..	34
Gambar 5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 2019, 2020 dan 2021.....	38
Gambar 5.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 2019-2021.....	39
Gambar 5.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) di Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 2019-2021.....	40
Gambar 5.4. Komposisi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama, 2019-2021.....	41

Gambar 5.5.	Komposisi Penduduk Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan, 2020 dan 2021.....	42
Gambar 5.6.	Setengah Pengangguran Sumatera Selatan dan Kabupaten Pecal Abab Lematang Ilir, 2019 - 2021.....	43
Gambar 7.1.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Tahun 2021.....	58
Gambar 7.2.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/Cuci, Tahun 2021.....	61
Gambar 9.1.	Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet, 2019-2021.....	76

<https://palikab.bps.go.id>

1

ANALISIS

Pada tahun 2021, pembangunan manusia di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir meningkat dengan nilai IPM 64,88

Kota yang meraih predikat IPM tinggi yaitu Kota Palembang (nilai IPM 78,72), Kota Lubuk Linggau (nilai IPM 74,89) dan Kota Prabumulih (nilai IPM 74,67)



The image shows a hand holding a red pen pointing to a table in a document. The table is partially visible and contains the following data:

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	
Tahun 2021	
Indikator Pembangunan Manusia	
Indikator	Nilai
IPM	64,88
IPM 2020	64,88
IPM 2019	64,88
IPM 2018	64,88
IPM 2017	64,88
IPM 2016	64,88
IPM 2015	64,88
IPM 2014	64,88
IPM 2013	64,88
IPM 2012	64,88
IPM 2011	64,88
IPM 2010	64,88
IPM 2009	64,88
IPM 2008	64,88
IPM 2007	64,88
IPM 2006	64,88
IPM 2005	64,88
IPM 2004	64,88
IPM 2003	64,88
IPM 2002	64,88
IPM 2001	64,88
IPM 2000	64,88

Tingginya kualitas manusia menjadi salah satu tujuan pembangunan secara keseluruhan. Ranis (2006) menyatakan bahwa pembangunan manusia adalah kontributor dari stabilnya proses pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berkontribusi terhadap tujuan fundamental pembangunan, tetapi juga sebagai faktor penting terhadap pertumbuhan ekonomi sepanjang waktu.

Pembangunan manusia yang tinggi mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi mempengaruhi kualitas pembangunan manusia (Findi dan Ezkirianto, 2013). Pada tahun 2021 pembangunan manusia di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan nilai IPM 64,88. Capaian ini diperoleh salah satunya karena meningkatnya komponen Kesehatan, pendidikan dan perekonomian di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Dari 17 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan, pada tahun 2021, memang IPM kabupaten ini paling kecil dibandingkan kabupaten/kota lain, apalagi dengan tiga kota yang meraih predikat IPM tinggi yaitu Kota Palembang (nilai IPM 78,72), Kota Prabumulih (nilai IPM 74,67) dan kota Lubuk Linggau (nilai IPM 74,89). Meskipun begitu, adanya peningkatan pada tahun 2021 menunjukkan adanya perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Komposisi Penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 2021

29,79 Persen

0-14 Tahun

4,49 Persen

65 + Tahun

65,72 Persen

15-64 Tahun

Sebagian besar penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah penduduk usia produktif. Dimana setiap 100 penduduk produktif menanggung sekitar 52 penduduk tidak produktif

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat didunia. Jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan karena menjadi subjek dan objek pembangunan. Namun jumlah penduduk yang besar jika tidak diiringi dengan pengendalian pertumbuhan penduduk serta upaya peningkatan kesejahteraannya maka bukan tidak mungkin jika suatu saat akan timbul masalah kesejahteraan penduduk.

Pengendalian jumlah penduduk diperlukan untuk mencegah ledakan penduduk yang dapat berdampak buruk pada kesejahteraan rakyat. Jumlah penduduk yang besar berarti lebih banyak kebutuhan akan fasilitas dasar seperti tempat tinggal, sekolah dan rumah sakit. Selain itu, jumlah penduduk yang besar juga berarti banyak lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Pemerintah perlu mempersiapkan sarana dan prasarana untuk menjamin kebutuhan dasar seluruh rakyat tercukupi.

Untuk menunjang keberhasilan pembangunan, pemerintah seharusnya tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tetapi juga menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Salah satu agenda pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Tabel 2.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 2017-2021

Tahun	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Pertumbuhan (ribu jiwa)^r	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	184.67	2.45	101.27
2018	187.28	2.61	101.17
2019	189.76	2.48	101.32
2020*	194.90	5.14	102.04
2021	197.29	2.39	101.92

Sumber: Penukal Abab Lematang Ilir Dalam Angka 2022, Badan Pusat Statistik

*) Data Hasil Sensus Penduduk 2020

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021-2026 adalah peningkatan kualitas sosial penduduk secara keseluruhan.

Penukal Abab Lematang Ilir sebagai salah satu kabupaten dengan wilayah yang cukup luas dan menyimpan potensi alam yang cukup besar tentu saja memerlukan sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan demi kesejahteraan bersama secara berkelanjutan. Jumlah penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2021 sekitar 197 ribu orang. Dari periode waktu tahun 2018 hingga tahun 2021 telah terjadi penambahan jumlah penduduk sekitar 10,01 ribu orang. Namun jika dilihat setiap tahunnya, pertambahan jumlah penduduk ini cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2017 penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir bertambah sebanyak 2,45 ribu jiwa, tahun 2018 pertambahannya meningkat sebanyak 2,61 ribu jiwa, kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 2,48 ribu jiwa, tahun 2020 terjadi penambahan yang cukup banyak, sebanyak 5,14 ribu jiwa dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang dapat dikatakan melambat

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 2018-2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)				Laju Per-tumbuhan Penduduk per Tahun
	2018	2019	2020	2021	2010-2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Talang Ubi	78,27	79,55	83,67	85,13	2.14
Tanah Abang	29,47	29,72	30,58	30,80	1.13
Abab	27,28	27,75	27,06	27,36	1.50
Penukal	28,57	28,73	30,18	30,39	1.09
Penukal Utara	23,69	24,01	23,42	23,60	1.16
PALI	187,28	189,76	194,90	197,29	1.60

Sumber: Penukal Abab Lematang Ilir Dalam Angka 2022, Badan Pusat Statistik

dibandingkan tahun sebelumnya, sebanyak 2,39 ribu jiwa .

Dilihat berdasarkan kecamatan pada periode 2010-2020, hanya satu kecamatan laju pertumbuhan penduduknya berada di atas laju pertumbuhan penduduk kabupaten. Sementara itu, kecamatan lainnya laju pertumbuhan penduduknya di bawah angka kabupaten. Mengamati pertumbuhan penduduk di tingkat kecamatan, terlihat Kecamatan Talang Ubi memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yakni sebesar 2,14 persen, diikuti Kecamatan Abab yakni 1,50 persen, Kecamatan Penukal Utara 1,16 persen dan Kecamatan Tanah Abang 1,13 persen. Kecamatan dengan dengan laju pertumbuhan penduduk terendah yaitu Kecamatan Penukal yakni 1,09 persen.

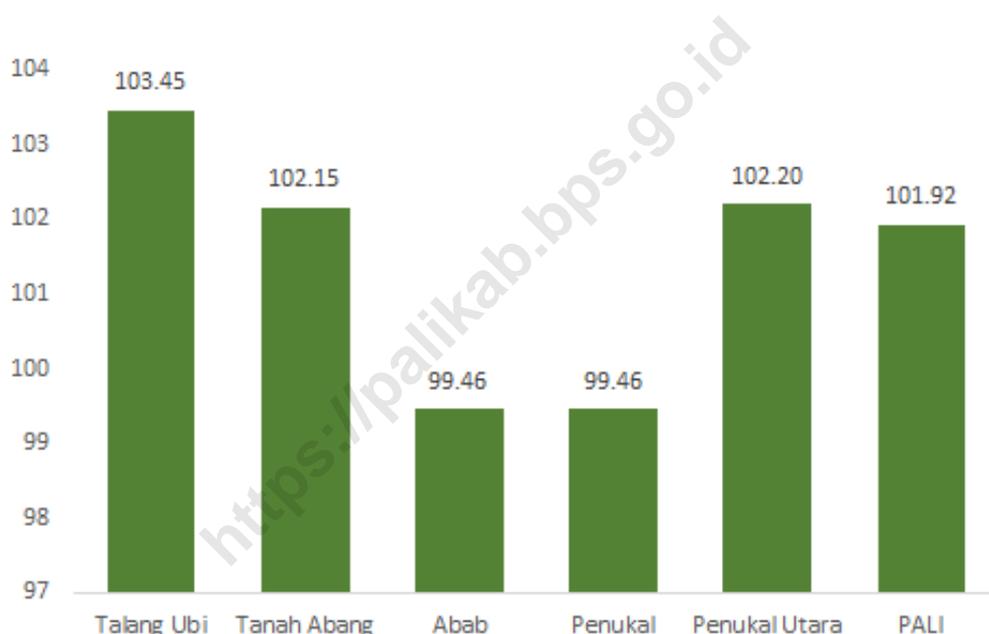
Laju pertumbuhan penduduk dapat ditekan melalui keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) yang didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi. Walaupun sudah ditekan, secara kuantitas peningkatan jumlah penduduk masih cukup besar. Berdasarkan proyeksi penduduk 2015-2025 oleh BPS, jumlah penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2025 akan mencapai sekitar 204 ribu orang.

Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2021 sebesar 101,92. Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan berbanding dengan sekitar 102 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Hal ini berlaku juga untuk angka rasio jenis kelamin di beberapa Kecamatan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang secara keseluruhan seluruh angkanya berada diatas 100, kecuali kecamatan Abab dan Penukal. Pada tahun 2021, rasio jenis kelamin terkecil terdapat di Kecamatan Abab dan Penukal (99), dan rasio jenis kelamin tertinggi di Kecamatan Talang Ubi (103).

Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan yang masih

harus dihadapi yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Ada beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, di wilayah lain masih ada wilayah yang hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif

Gambar 2.1. Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 2021



Sumber: BPS, Diolah

Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Seiring jumlah penduduk yang semakin bertambah, kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan. Kepadatan penduduk merupakan indikator tekanan penduduk pada suatu wilayah. Tahun 2017, kepadatan penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebesar 100 orang/km² dan meningkat menjadi 107 orang/km² pada tahun 2021. Salah satu permasalahan terkait kepadatan penduduk yaitu persebaran penduduk yang tidak merata, yang mana lebih terkonsentrasi di Kecamatan Tanah Abang.

Komposisi penduduk menurut umur bermanfaat untuk mengetahui distribusi penduduk usia muda (0-14 tahun), usia produktif (15-64 tahun), dan lansia (65+ tahun). Tabel 2.3 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah penduduk usia produktif dengan tren yang cenderung meningkat menjadi di atas 64

Tabel 2.3. Indikator Demografi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 2017-2021

Indikator Demografi	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Penduduk (ribu orang)	184,7	187,2	189,8	194,9	197,3
Laju Pertumbuhan Penduduk Ekspansional (persen/tahun)	1,34	1,41	1,32	1,60	1,60
Rasio Jenis Kelamin (persen)	101,27	101,17	101,32	102,04	101,92
Kepadatan Penduduk (orang/km ²)	100	102	103	106	107
Komposisi Penduduk (persen)					
0-14 tahun	31,34	33,05	30,90	29,95	29,79
15-64 tahun	64,67	62,83	64,77	65,78	65,72
65+ tahun	3,98	4,12	4,33	4,27	4,49
Angka Beban Ketergantungan (persen)	59,49	59,17	54,40	52,01	52,15

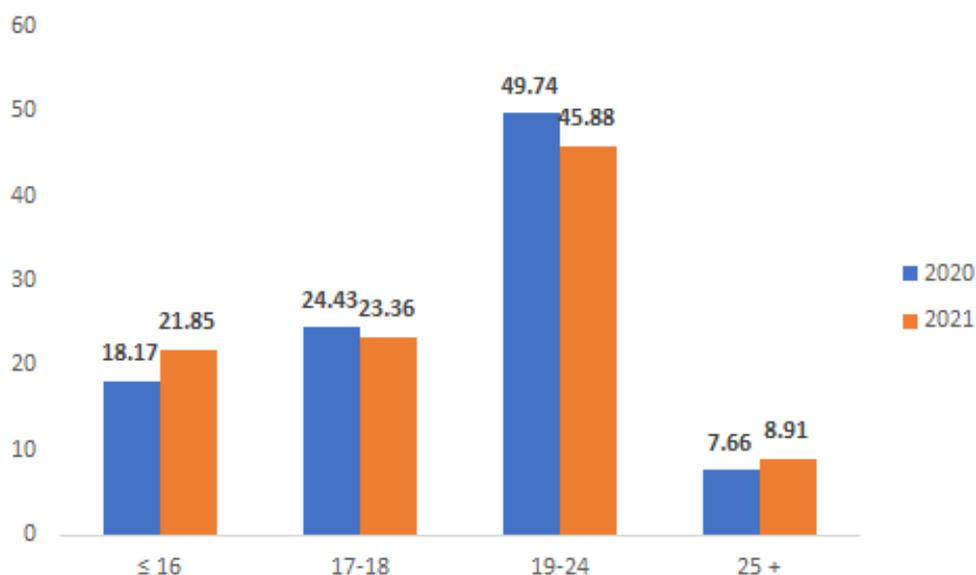
Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, Badan Pusat Statistik

persen, sementara persentase penduduk usia muda menunjukkan tren yang cenderung menurun.

Angka Beban Ketergantungan

Peningkatan struktur penduduk usia produktif dan penurunan struktur penduduk usia tidak produktif (usia muda dan lansia) memberikan dampak pada angka beban ketergantungan. Angka beban ketergantungan menunjukkan kecenderungan menurun selama lima tahun terakhir, yakni dari 59,49 pada tahun 2017 menjadi 52,15 pada tahun 2021. Angka beban ketergantungan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir masih lebih tinggi jika dibandingkan angka provinsi. Angka beban ketergantungan sebesar 52,15 dapat diartikan setiap 100 penduduk produktif menanggung sekitar 52 penduduk tidak produktif yang terdiri dari anak-anak dan lansia. Saat ini Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah berada pada era bonus demografi.

Gambar 2.2. Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Umur Perkawinan Pertama 2020 dan 2021



Sumber: Buku Saku Data dan Indikator Sosial Provinsi Sumatera Selatan 2017-2021

Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama

Jumlah penduduk yang besar salah satunya disebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi. Angka kelahiran tinggi dipengaruhi masa reproduksi seorang perempuan. Semakin panjang masa reproduksi, maka kemungkinan jumlah anak yang dilahirkan semakin banyak. Masa reproduksi perempuan dapat dihitung dari usia kawin pertama. Gambar 2.2 menunjukkan perkembangan persentase perempuan umur 10 tahun keatas yang pernah kawin menurut usia perkawinan pertama. Pada tahun 2021 masih terjadi peningkatan persentase perempuan pernah kawin dengan usia kawin pertama 18 tahun ke bawah, dari 42,6 persen pada tahun 2020 selanjutnya menjadi 45,21 persen tahun 2021. Sebaliknya, persentase perempuan yang melakukan perkawinan pertama pada usia 19 tahun keatas mengalami penurunan. Peningkatan persentase pada pernikahan usia muda (dibawah 18 tahun), merupakan kondisi yang perlu mendapat perhatian, agar kedepannya resiko yang dapat ditimbulkan akibat pernikahan dini baik dari segi kesehatan maupun sosial dapat berkurang.

Penggunaan Alat/Cara KB

Di samping pendewasaan usia kawin pertama, cara lain yang efektif dalam mengendalikan angka kelahiran yaitu melalui program Keluarga Berencana (KB). Tabel 2.4 menunjukkan bahwa secara keseluruhan, persentase perempuan berumur 19-45 tahun berstatus kawin dan sedang menggunakan alat/cara KB mengalami peningkatan pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Peningkatan persentase akseptor KB ini perlu mendapatkan apresiasi namun tetap perlu dicermati oleh pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sehingga kedepannya tidak kembali menurun. Pada tahun 2020, wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan kontrasepsi sebesar 64,94 persen. Tahun berikutnya, persentase wanita yang menggunakan

Tabel 2.4. Persentase Wanita Berumur 15-49 tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Jenis Alat/Cara KB, 2020 dan 2021

Alat/Cara Kontrasepsi	2020	2021
(1)	(2)	(3)
MOW/Tubektomi	1.64	2.07
MOP/Vasektomi	0.00	0.00
IUD/Spiral	2.85	2.70
Suntikan	67.40	61.37
Susuk KB	16.26	21.54
Pil	11.40	8.85
Kondom	0.45	0.00
Intravag/Tissue/Kondom Wanita	0.00	0.00
Cara Tradisional	0.00	3.46
Wanita yang sedang menggunakan alat KB	64.94	69.48

Sumber: Buku Saku Data Indikator Sosial Provinsi Sumatera Selatan 2017-2021

kontrasepsi sebesar 69,48 persen.

Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB dengan memperhatikan berbagai faktor seperti keamanan, efek samping, harga yang terjangkau, penggunaan yang praktis serta memberi kenyamanan bagi penggunanya. Berbagai macam alat/cara KB digunakan oleh pasangan usia subur Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, namun yang paling banyak peminatnya adalah penggunaan alat KB suntikan dan susuk KB. Penggunaan metode suntikan menjadi persentase terbesar penggunaan alat KB kemudian diikuti penggunaan susuk dan Pil KB. Pada tahun 2020 penggunaan suntikan mencapai 67,40 persen, tetapi jumlah penggunanya mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 61,37 persen. Berbeda dengan jumlah pengguna metode suntikan, penggunaan susuk KB mengalami peningkatan dari 16,26 persen pada tahun 2020 menjadi 21,54 persen pada tahun 2021. Sementara Penggunaan pil mengalami penurunan dari 11,40 persen pada tahun 2020 menjadi 8,85 persen pada tahun 2021.

Pada tahun 2021, Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan/ Asuransi Kesehatan gratis untuk Berobat Jalan sebesar 85,49 persen

Persentase perempuan yang melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan yaitu sekitar 95,62 persen di tahun 2021

Kesehatan merupakan salah satu tolak ukur utama kemajuan ekonomi dan kesejahteraan. Peningkatan kesehatan tidak hanya dipandang sebagai suatu kebutuhan tetapi merupakan suatu bentuk investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semakin sehat kondisi masyarakat, maka akan semakin mendukung proses pembangunan ekonomi suatu wilayah dengan meningkatkan produktivitasnya. Hal ini juga ditentukan dalam RPJMD 2021-2026 pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase wanita yang penolong persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Kesehatan seseorang tidak hanya diukur dengan kondisi fisik namun juga lingkungan serta akses terhadap makanan bergizi, akses pelayanan kesehatan hingga budaya hidup sehat di kalangan masyarakat. Pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk menggambarkan capaian derajat kesehatan digunakan indikator kualitas utama seperti angka kematian, kesakitan, kelahiran, status gizi dan lain-lain.

Morbiditas atau angka kesakitan merupakan salah satu indikator untuk mengetahui derajat kesehatan suatu wilayah. Angka kesakitan menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu

penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Hasil Susenas tahun 2021 menunjukkan Angka Kesakitan penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mencapai 9,32 persen, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar 15,66 persen. Pada tahun 2021 sebanyak 85,49 persen penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sudah memiliki jaminan/asuransi Kesehatan gratis, yang meningkat dari tahun sebelumnya, yakni sebesar 83,41 persen.

Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

Kurang gizi merupakan salah satu ancaman serius bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan suatu bangsa. Hal ini menjadi masalah karena adanya beban jumlah anak kurang gizi yang cukup besar, mereka yang mengalami kurang gizi tidak akan berprestasi di sekolahnya. Sejalan dengan hal itu, maka ibu yang sedang mengandung harus mulai memperhatikan asupan yang dimakannya dan juga harus melakukan imunisasi, karena hal tersebut merupakan gizi dan imunisasi awal bagi seorang anak. Setelah sang anak lahir, pemberian Air Susu Ibu (ASI) sangat dianjurkan untuk diberikan ke pada bayi karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. Oleh sebab itu, pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 bulan ke depan, tanpa menambahkan atau mengganti makanan/minuman lain. Selanjutnya setelah bayi berusia 6 bulan keatas dilanjutkan bersama dengan makanan tambahan dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun

Berdasarkan hasil Susenas 2020, menunjukkan bahwa anak usia 2 tahun yang mendapatkan ASI Eksklusif ada sebanyak 34,68 persen, dan mengalami peningkatan hingga menjadi 56,15 persen pada tahun 2021. Begitu pula dengan persentase anak usia 2 tahun yang diberikan ASI Eksklusif, rata-rata lama anak disusui pada tahun 2021 juga meningkat menjadi 9,85 bulan dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 8,71 bulan. Meskipun kondisi lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, namun hal ini tentu masih cukup jauh dari angka yang dianjurkan yaitu seorang anak sebaiknya diberi ASI/disusui hingga usia 2 tahun atau 24 bulan mengingat pentingnya ASI dalam meningkatkan imunitas dan pertumbuhan.

Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Jenis imunisasi ada dua macam yaitu imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir dan imunisasi aktif dimana kekebalan didapat dari pemberian vaksin kepada anak melalui suntik atau tetes.

Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang disekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili dan Hepatitis B. Pada tahun 2021, Persentase Penduduk Berumur 0–59 Bulan (Balita) yang mendapat Imunisasi Lengkap menurut Susenas Maret baru mencapai 29,34 persen. Kekhawatiran masyarakat akan adanya vaksin palsu serta kehalalan bahan pembuat vaksin mungkin merupakan salah satu alasan para orangtua tidak mau mengimunisasi anak-anak mereka.

Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Tenaga medis merupakan salah satu bagian dalam sistem kesehatan

yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai upaya dan pelayanan kesehatan. Pentingnya peranan tenaga medis salah satunya adalah menurunkan angka kematian ibu, yaitu dengan meningkatkan pertolongan persalinan dan meningkatkan pelayanan neonatal. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya.

Usaha pemerintah dalam menyediakan tenaga kesehatan sudah memperlihatkan hasil yang baik, dimana persentase perempuan yang pernah melahirkan dan ditolong oleh tenaga kesehatan sudah cukup baik yaitu sekitar 95,62 persen, persentasenya pun meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 92,45 persen. Sementara itu sebanyak 4,38 persen ditolong oleh selain tenaga kesehatan.

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan tidak hanya dilihat dari indikator penolong persalinan tetapi juga dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Dari informasi tersebut dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, sosial-ekonomi penduduk yaitu kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya serta jenis pelayanan kesehatan.

Penjaminan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional telah membuka akses dan peluang yang lebih besar kepada masyarakat secara umum untuk memperoleh pelayanan dan fasilitas kesehatan dengan biaya yang lebih terjangkau. Bila diamati menurut fasilitas

kesehatan, pada tahun 2021 sebagian besar penduduk lebih banyak memilih fasilitas kesehatan Praktek Dokter/Bidan/Klinik/Praktek Dokter Bersama/Petugas Kesehatan. Dipilihnya fasilitas ini karena lebih banyak tersebar di seluruh wilayah dan prosedurnya lebih mudah dibandingkan di rumah sakit. Fenomena yang cukup menarik yaitu meningkatnya pengobatan tradisional di kalangan masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk kembali ke alam termasuk dalam menyembuhkan penyakit turut mendorong meningkatnya pengobatan tradisional daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Tabel 3.1. Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Penolong Persalinan Terakhir, 2020-2021

Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Tenaga Kesehatan		
Dokter	15.59	14.14
Bidan	76.81	81.49
Tenaga Kesehatan Lainnya	0.05	0.00
Bukan Tenaga Kesehatan		
Dukun Beranak, Paraji	4.82	3.73
Lainnya	2.73	0.65
Tidak Ada	0.00	0.00

Sumber: Buku Saku Data Indikator Sosial Provinsi Sumatera Selatan 2017-2021

Tabel 3.2. Persentase Kunjungan Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat, 2020 dan 2021

Indikator	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Persentase Kunjungan Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat		
Rumah Sakit	15.69	11.89
Praktek Dokter/Bidan/Klinik/Praktek Dokter Bersama/Petugas Kesehatan	47.84	47.84
Puskesmas Pembantu & UKBM	39.27	36.27
Pengobatan Tradisional	0.81	1.74
Lainnya	0.00	0.00

Sumber: Buku Saku Data Indikator Sosial Provinsi Sumatera Selatan 2017-2021

4

PENDIDIKAN

Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas
Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang dimiliki, 2021

30,47 Persen

Tidak Punya

26,32 Persen

SD/Sederajat

18,13 Persen

SMP/Sederajat

21,91 Persen

SMA/Sederajat

3,17 Persen

Perguruan Tinggi

Sekitar 41,23 persen penduduk Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir menyelesaikan wajib belajar
9 tahun

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 sebagai RPJMN 2024 diusung tema peningkatan SDM dalam pertumbuhan berkualitas. Perencanaan ke depan akan berfokus pada pengembangan SDM dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) agar Indonesia bisa tumbuh secara berkelanjutan atau sesuai *Sustainable Development Growth* (SDGs) dengan target berprestasi menengah tinggi.

Sebagaimana halnya di Indonesia, pendidikan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir juga terus berbenah agar lebih maju dan mencapai cita-cita yang diharapkan. Untuk dapat melihat sejauh mana capaian pembangunan khususnya bidang pendidikan dapat digunakan beberapa indikator output yang dihasilkan BPS antara lain Angka Melek Huruf (AMH), Tingkat Pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Adapun sebagai Indikator input pendidikan salah satunya adalah fasilitas pendidikan. Meskipun banyak peningkatan positif dari indikator-indikator pembangunan pendidikan tersebut, tetapi masih ada beberapa indikator pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang perlu mendapat perhatian lebih untuk ditingkatkan di masa mendatang.

Angka Melek Huruf (AMH)

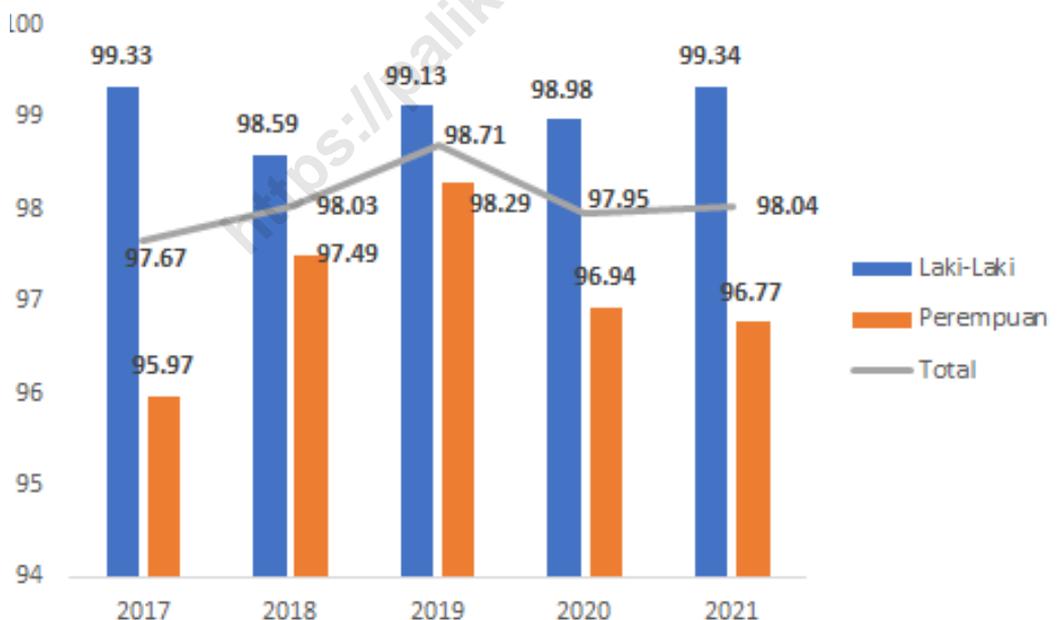
Kata “melek huruf” dapat diartikan sebagai kemampuan untuk dapat membaca dan menulis huruf latin/lainnya pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain atau dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca tulis. AMH merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan bidang pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia suatu daerah.

Angka Melek Huruf Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir cenderung berfluktuatif. Pada periode 2017 hingga 2021 atau dalam kurun waktu 5 tahun AMH Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dari 99,33 persen pada 2017 menjadi 99,34 persen pada 2021. Pada tahun 2021 AMH Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mencapai 99,34 persen yang berarti sekitar 99,34 persen masyarakat Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir berusia 15 tahun ke atas sudah melek huruf, sementara sisanya yaitu sebesar 0,66 persen termasuk kategori buta huruf.

Berdasarkan jenis kelamin, AMH pada laki-laki selalu di atas nilai AMH perempuan. Sepanjang periode 2016 hingga 2020 AMH laki-laki selalu lebih tinggi daripada perempuan. Namun pada gambar 4.1 terlihat bahwa perbedaannya cenderung semakin kecil dari tahun ke tahun. Semakin mengecilnya perbedaan ini menunjukkan bahwa terjadinya pemerataan pendidikan laki-laki dan perempuan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dari tahun ke tahun.

Gambar 4.1. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas, 2017-2021



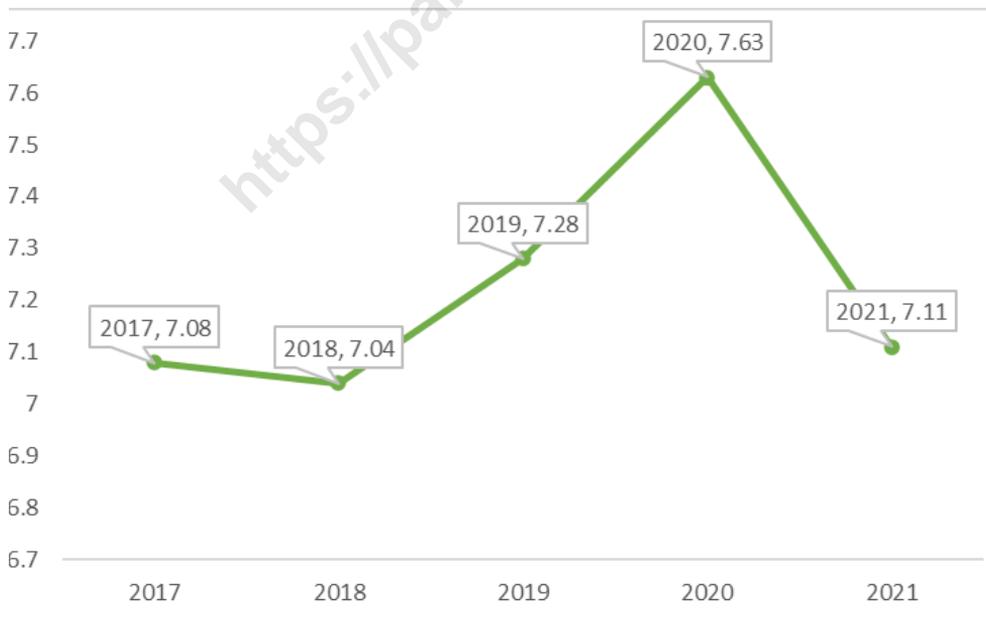
Sumber: Buku Saku Data Indikator Sosial Provinsi Sumatera Selatan 2006-2020

Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu capaian dalam pembangunan pendidikan. Dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator yang menjadi penentu nilai indeks pendidikan. Rata-rata lama sekolah dihitung pada penduduk usia 25 tahun ke atas. Artinya rata-rata lama sekolah dihitung pada penduduk usia yang telah selesai menyelesaikan pendidikan dan masuk ke pasar kerja.

Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2021 adalah 7,11. Artinya penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir usia 15 tahun ke atas pada tahun 2021 rata-

Gambar 4.2. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (tahun), 2017-2021



Sumber: Buku Saku Data Indikator Sosial Provinsi Sumatera Selatan 2017-2021

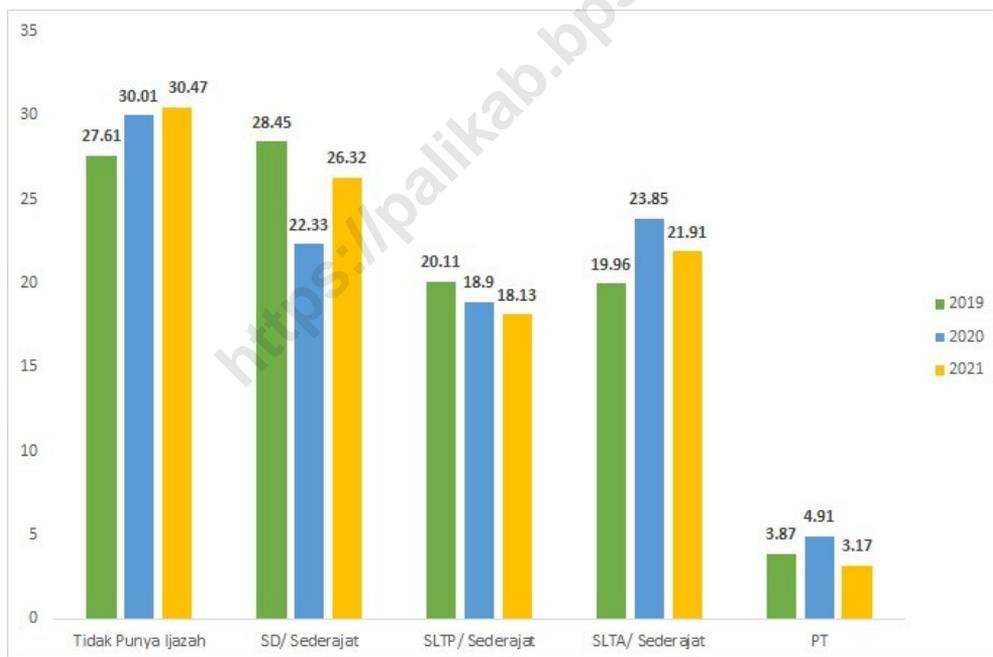
rata mengenyam pendidikan hingga kelas VIII atau setara kelas 2 SLTP. Peningkatan nilai rata-rata lama sekolah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menjadi modal penting peningkatan kualitas SDM. Salah

satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong kegiatan Kejar Paket.

Penduduk Menurut STTB/Ijazah Tertinggi

Banyaknya penduduk yang berhasil memperoleh STTB/ijazah tertinggi merupakan indikator yang dapat menggambarkan keberhasilan dalam pembangunan pendidikan formal. Sepanjang periode tahun 2019-2021 persentase penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang

Gambar 4.3. Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang dimiliki, 2019-2021



Sumber: Buku Saku Data Indikator Sosial Provinsi Sumatera Selatan 2017-2021

mendapatkan ijazah level dasar cenderung meningkat sedangkan yang memperoleh ijazah untuk Pendidikan SLTP/ sederajat, SLTA/ sederajat, dan perguruan tinggi menurun.

Untuk level Sekolah Dasar sederajat sekitar 26,32 persen yang berhasil memperoleh ijazah dan 18,13 persen yang berhasil menamatkan level SMP sederajat. Atau dapat dikatakan bahwa pada level Sekolah Dasar (SD

dan SLTP) terdapat setidaknya 18,13 persen penduduk berumur 15 tahun keatas di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang menyelesaikan wajib belajar 9 tahun. Data ini sejalan dengan rata-rata lama sekolah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang baru menyentuh level 8 tahun atau kelas 2 SMP.

Pada tahun 2021 persentase penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang memiliki ijazah SMA sederajat ke atas cenderung meningkat jika dibandingkan pada 2019 dan 2020. Pada tahun 2019 sekitar 23,83 persen penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memperoleh ijazah SMA ke atas. Angka ini naik menjadi 28,76 persen di tahun 2020 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 25,08 persen. Ini mengindikasikan penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir lebih tereduksi di level pendidikan tinggi.

Partisipasi Sekolah (APS dan APM)

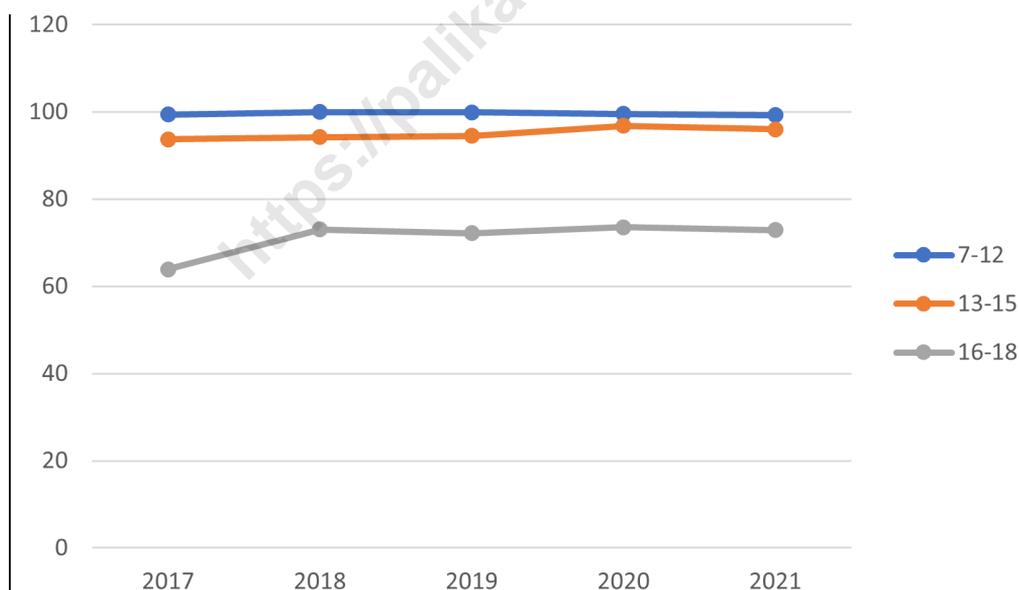
Salah satu tujuan dari *Sustainable Development Growth (SDG's)/* Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah menjamin semua anak, perempuan dan laki-laki pada tahun 2030 menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

Untuk melihat sudah seberapa besar penduduk mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Sekolah atau yang biasa disingkat dengan APS. Secara definisi APS merupakan perbandingan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu yang masih sekolah dengan jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia yang bersesuaian. Umumnya APS dihitung untuk kelompok usia 7-12 tahun; 13-15 tahun, 16-18 tahun dan 19-24 tahun. Semakin tinggi nilai APS berarti semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan.

Pada tahun 2021 APS untuk usia 7-12 tahun di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebesar 99,23 artinya dari seluruh penduduk Penukal

Abab Lematang Ilir berusia 7-12 tahun sekitar 99,23 persen telah bersekolah. Dan hanya terdapat 0,77 persen saja penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir usia 7-12 tahun yang belum mengenyam pendidikan. Jika mencermati *trend* sepanjang tahun 2017-2021 APS untuk usia 7-12 tahun di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir cenderung menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2017 APS usia 7-12 tahun di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sudah mencapai 99,41 dan terus naik hingga mencapai nilai 100 di tahun 2018. Namun, pada tahun 2019 hingga tahun 2021 nilai APS 7-12 tahun sedikit turun dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar 99,23 pada tahun 2021.

Gambar 4.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Menurut Kelompok Umur, 2017-2021



Sumber: Buku Saku Data Indikator Sosial Provinsi Sumatera Selatan 2017-2021

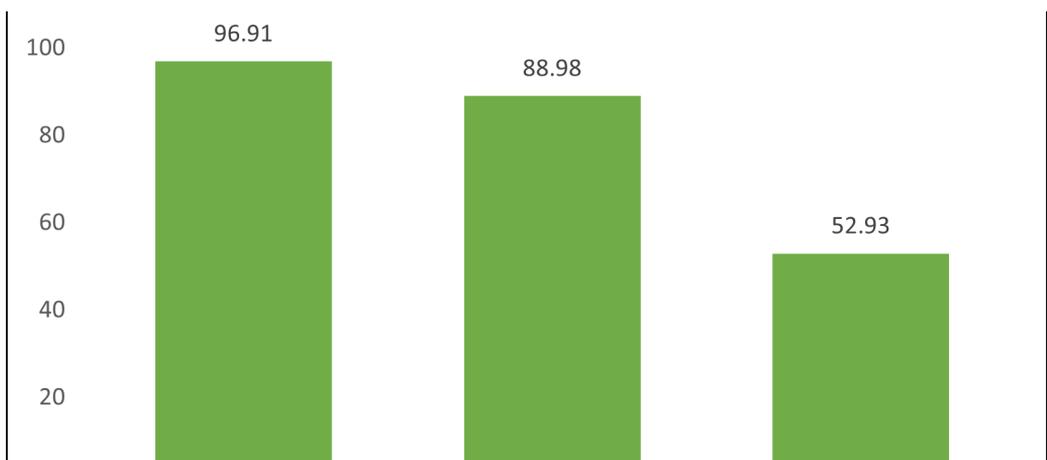
Berbeda halnya dengan APS usia 13-15 tahun di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yang cenderung mengalami kenaikan sepanjang periode tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 APS usia 13-15 tahun di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebesar 93,70 persen dan cenderung meningkat menjadi 96,00 persen di tahun 2021. Peningkatan

ini tentu tidak lepas dari berbagai program pembangunan pendidikan dari Pemerintah, terutama program wajib belajar 9 tahun dan program sekolah gratis.

APS Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2021 untuk kategori usia 16-18 tahun masih perlu mendapatkan perhatian lebih. Terdapat gap yang cukup jauh antara APS kelompok umur 16-18 tahun yang berada jauh di bawah APS kelompok umur 7-12 tahun dan APS 13-15 tahun. Pada tahun 2021 APS usia 16-18 tahun di Penukal Abab Lematang Ilir sebesar 72,87 persen. Artinya masih terdapat sekitar 27,13 persen penduduk usia 16-18 tahun di Penukal Abab Lematang Ilir yang sudah tidak bersekolah lagi. Meskipun begitu pada tahun 2021 kenaikan APS usia 16-18 tahun di Penukal Abab Lematang Ilir berfluktuatif dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 APS usia 16-18 tahun di Penukal Abab Lematang Ilir sebesar 63,89 tahun meningkat menjadi 72,87 di tahun 2021.

Angka Partisipasi Murni atau biasa disebut APM merupakan persentase jumlah anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok

Gambar 4.5 Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Menurut Tingkat Pendidikan, 2021



Sumber: Buku Saku Data Indikator Sosial Provinsi Sumatera Selatan 2017-2021

APM Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2021 untuk level pendidikan dasar (SD dan SLTP), nilainya tetap lebih tinggi dibandingkan APM untuk tingkat pendidikan SMA Hal ini berarti kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi masih belum banyak.

Kualitas Pelayanan Pendidikan

Pendidikan dapat berlangsung maksimal dan mencapai sasaran yang diharapkan jika ditunjang pelayanan pendidikan yang berkualitas. Pelayanan pendidikan disini mencakup sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Depdiknas (2008) sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sebagai contoh sarana adalah ruang kelas, buku, papan tulis dan lain sebagainya. Prasarana adalah alat tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan misalnya lokasi/tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga dan lain sebagainya.

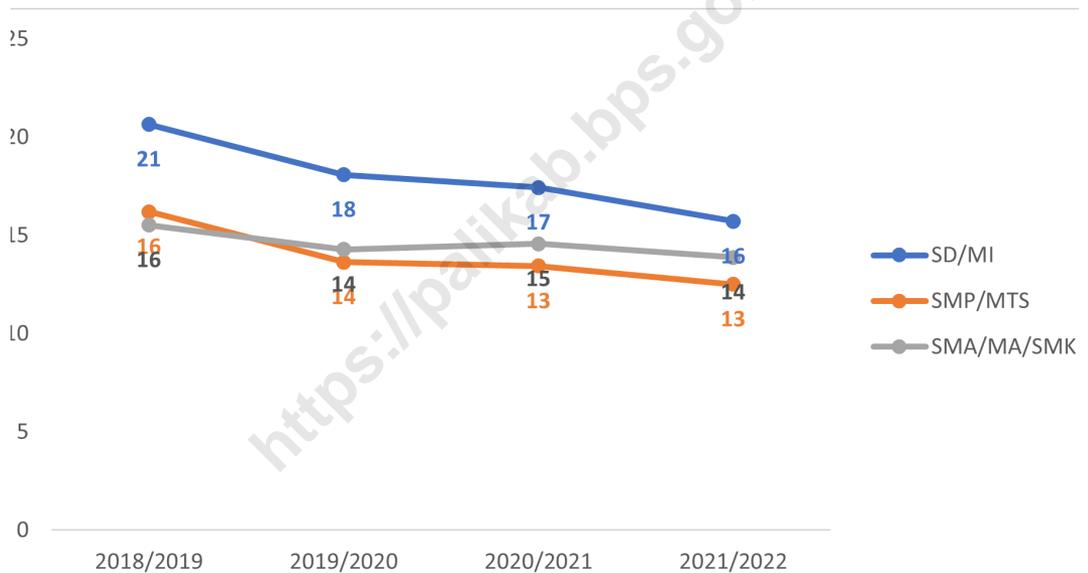
Sehubungan dengan prioritas pemerintah untuk mewujudkan SDM maju, maka harus dibarengi peningkatan pembangunan yang menunjang terwujudnya SDM maju, yaitu peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Permasalahan yang kerap ditemui adalah adanya disparitas pendidikan antar wilayah. Pembangunan pendidikan yang belum merata menjadi suatu permasalahan tersendiri yang sudah harus dicari solusinya.

Selama kurun tahun 2018-2021, rasio murid-guru baik pada level SD sederajat hingga SLTA sederajat cenderung menurun. Pada tahun ajaran 2018/2019 untuk level SD sederajat untuk satu orang guru di Penukal Abab Lematang Ilir mengajar rata-rata 21 murid, sedangkan pada tahun ajaran 2021/2022 satu orang guru SD rata-rata mengajar 16 murid. Untuk SLTP sederajat pada tahun ajaran 2018/2019 satu orang guru rata-rata

mengajar 16 murid sedangkan pada tahun ajaran 2021/2022 satu orang guru SLTP sederajat, rata-rata mengajar 13 murid. Pada level SLTA sederajat, satu orang guru pada tahun ajaran 2018/2019 rata-rata mengajar 16 murid. Pada tahun ajaran 2021/2022 nilainya hampir sama, yakni tetap sekitar 14 murid.

Rasio Murid-Sekolah merupakan perbandingan jumlah murid dengan jumlah sekolah. Indikator ini mampu menggambarkan daya tam-

Gambar 4.6. Perkembangan Rasio Murid-Guru Tahun Ajaran 2018 - 2021



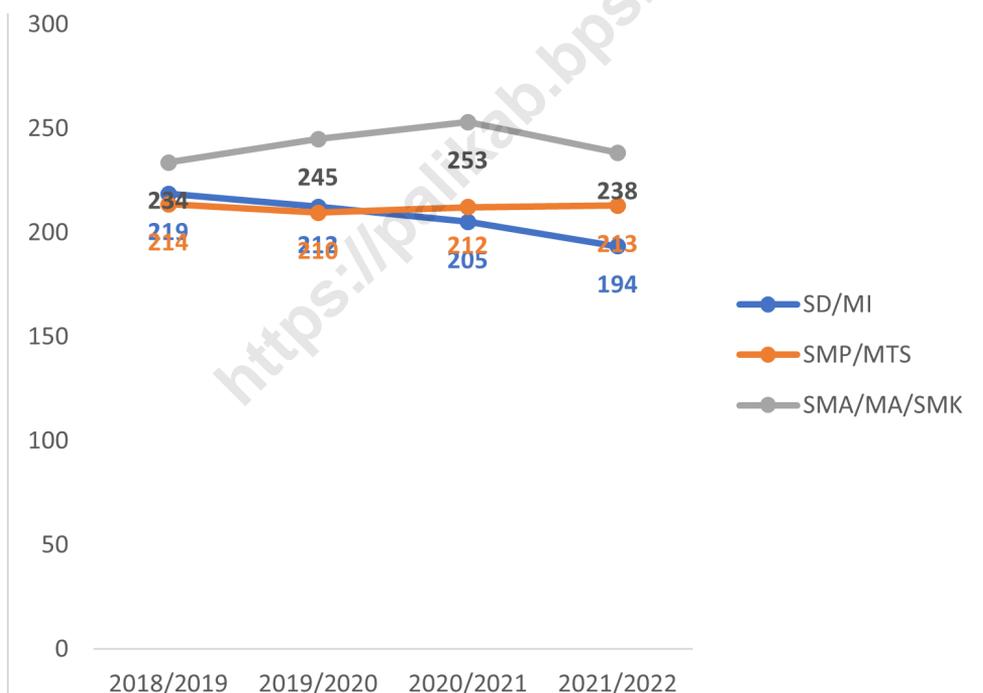
Sumber: Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam Angka, 2022

pung sekolah di Penukal Abab Lematang Ilir sekaligus menggambarkan tersedianya fasilitas gedung sekolah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Jika dibandingkan dengan tahun ajaran 2018/2019, rasio murid-sekolah pada tahun ajaran 2021/2022 cenderung berfluktuatif. Pada tahun ajaran 2018/2019 satu sekolah SD menampung sekitar 219 siswa, sedangkan pada tahun ajaran 2021/2022 menampung sekitar 194 siswa. Untuk SLTP pada tahun ajaran 2018/2019 rata-rata satu sekolah dapat menampung sekitar 214 siswa dan menurun sedikit menjadi sekitar 213 siswa di tahun ajaran 2021/2022. Pada level SLTA rata-rata satu sekolah di tahun

ajaran 2018/2019 dapat menampung 234 siswa namun pada tahun ajaran 2021/2022 rata-rata menampung 238 siswa.

Rasio murid-guru dan rasio murid-sekolah menggunakan data yang diperoleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Kementerian Agama, dimana SD sederajat yang dimaksud termasuk SD dan madrasah ibtidaiyah, SMP sederajat termasuk SMP dan madrasah tsanawiyah, SLTA sederajat termasuk SLTA, Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Gambar 4.7. Perkembangan Rasio Murid-Sekolah Tahun ajaran 2018-2021



Sumber: Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam Angka, 2022

5

KETENAGAKERJAAN

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Menurut Jenis Kelamin 2021

3,61 Persen
Total

5,03 Persen
Laki-laki

1,89 Persen
Perempuan

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) untuk penduduk berjenis kelamin Perempuan lebih tinggi daripada penduduk yang berjenis kelamin Laki-laki.

Peningkatan potensi Sumber Daya Manusia Indonesia selayaknya dibarengi penyediaan lapangan kerja terutama untuk generasi terdidik. Data menunjukkan tingkat pengangguran saat ini justru didominasi penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi. Hal ini karena umumnya mereka yang pendidikan rendah tidak memilih pekerjaan. Sedangkan yang menamatkan pendidikan tinggi lebih selektif dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya.

Problematika ketenagakerjaan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tidak jauh berbeda dengan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia pada umumnya. Meskipun tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir lebih rendah dari angka provinsi, namun masalah produktivitas masih menjadi tantangan. Jumlah penduduk yang jam kerjanya di bawah 35 jam seminggu masih cukup tinggi. Tantangan terbesar lainnya adalah menciptakan lapangan kerja atau usaha yang layak bagi angkatan kerja yang harus diantisipasi dari sejak dini sebelum terjadi peningkatan karena perubahan struktur umur penduduk. Tantangan itu mencakup dua aspek sekaligus, yaitu penciptaan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja yang belum bekerja, dan peningkatan produktivitas kerja bagi mereka yang sudah bekerja sehingga dapat memperoleh imbalan kerja yang memadai untuk dapat hidup secara layak (*decent living*).

Dalam menyusun kebijakan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan sangat penting menggunakan data yang terkait ketenagakerjaan. Beberapa indikator yang menggambarkan ketenagakerjaan antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut kelompok lapangan usaha dan lain-lain. Indikator-indikator tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan menekankan perkembangan antar tahun 2020 dan 2021. Analisis ini menarik karena menggambarkan situasi ketenagakerjaan Kabupaten

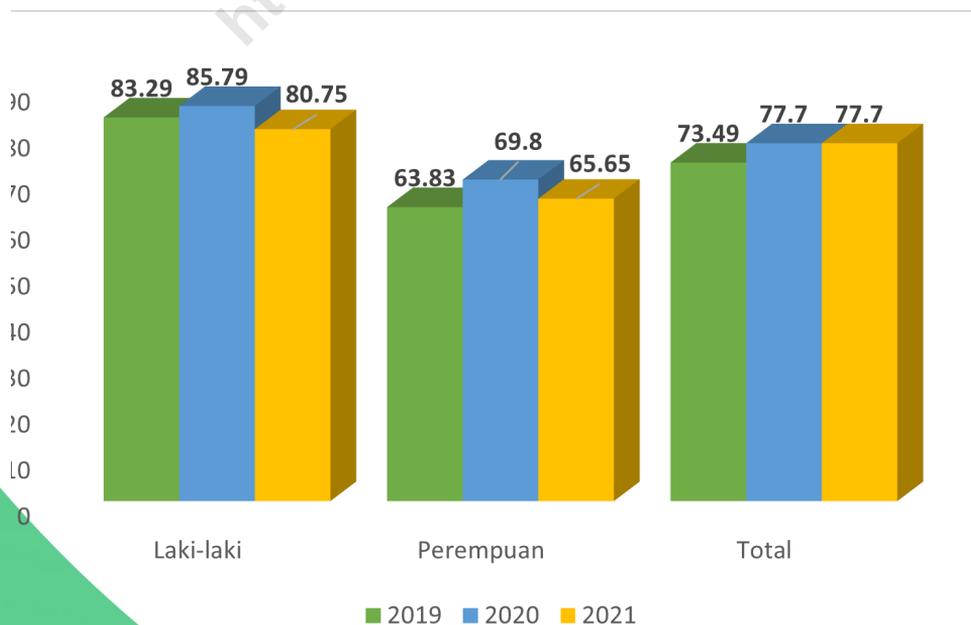
Penukal Abab Lematang Ilir setelah terimbas pandemic Covid-19.

Data-data terkait ketenagakerjaan bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Dimulai dari Sakernas 2021, penghitungan dilakukan dengan menggunakan proyeksi hasil SUPAS 2015. Karena hal tersebut penghitungan indikator sebelumnya yang menggunakan proyeksi hasil Sensus Penduduk dikoreksi. Untuk menjaga keterbandingan, penyajian data series akan menggunakan estimasi dengan penimbang dari proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015.

TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK didefinisikan sebagai perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Semakin tinggi angka TPAK menjadi sebuah indikator meningkatnya kecenderungan angkatan kerja untuk mencari pekerjaan atau melakukan aktivitas ekonomi. TPAK penduduk berjenis kelamin laki-laki di Kabupaten

Gambar 5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 2019, 2020 dan 2021



Sumber: Buku Saku Data Indikator Sosial Provinsi Sumatera Selatan 2006-2020

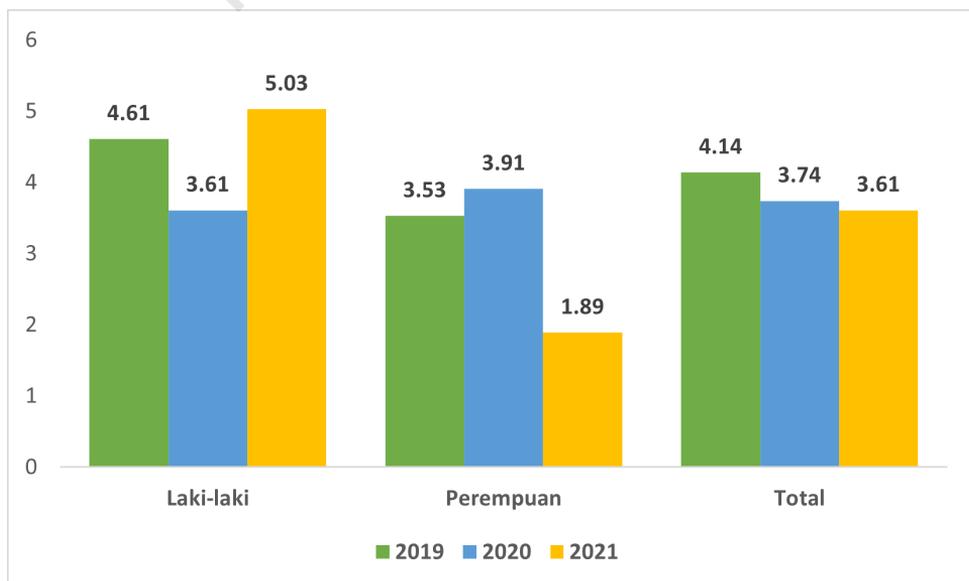
Penukal Abab Lematang Ilir umumnya lebih tinggi daripada penduduk perempuan. Hal ini sangat terkait erat dengan jenis pekerjaan yang tersedia cukup berbeda tergantung jenis kelamin penduduk.

TPAK Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengalami peningkatan pada Agustus 2020 dan menurun pada Agustus 2021. Namun secara total, TPAK pada tahun 2020 dan 2021 hampir sama. Hal ini dikarenakan salah satunya disebabkan oleh pertumbuhan TPAK perempuan yang masih tinggi, dibandingkan tahun 2019. Artinya pada tahun 2021 penduduk perempuan yang aktif di pasar kerja tetap meningkat, baik penduduk bekerja maupun penduduk perempuan yang mencari pekerjaan (menganggur), meskipun tidak sebanyak tahun 2020.

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada Agustus 2021 yaitu 3,61 persen. Angka ini lebih ren-

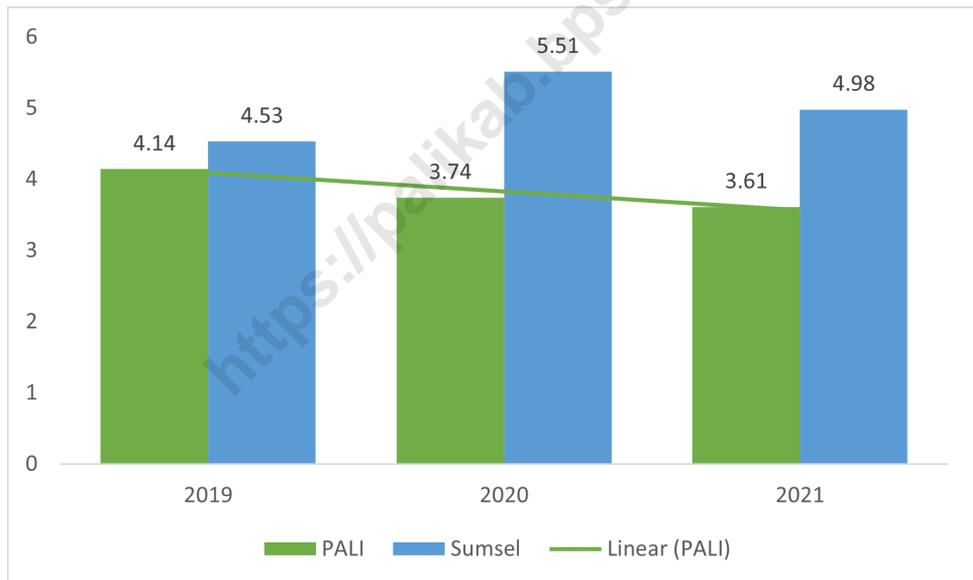
Grafik 5.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 2019 - 2021



Sumber: Buku Saku Data Indikator Sosial Provinsi Sumatera Selatan 2006-2020

dah dari Agustus 2020 dengan nilai TPT sebesar 3,74 persen. Hal ini dikarenakan salah satunya terjadi penurunan TPT secara signifikan pada penduduk berjenis kelamin perempuan. Meskipun begitu, terdapat kenaikan TPT pada penduduk berjenis kelamin laki-laki. Hal ini terkait dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan melemahnya sektor ekonomi sehingga berimbas pada meningkatnya pengangguran.

Gambar 5.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) di Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 2019-2021



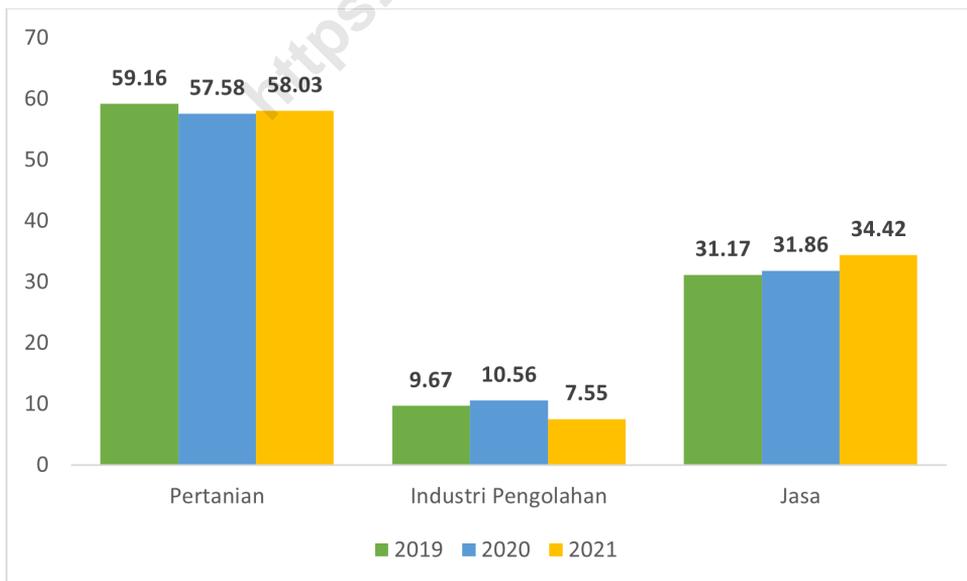
Sumber: Buku Saku Data Indikator Sosial Provinsi Sumatera Selatan 2017-2021

LAPANGAN USAHA DAN STATUS PEKERJAAN

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini hanya disajikan untuk tiga kategori dengan penyerapan tenaga kerja tertinggi yaitu kategori pertanian, industri, dan jasa.

Secara umum, lebih dari separuh penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir bekerja pada kelompok kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan Dan Perikanan yaitu sebesar 58,03 persen. Meskipun sektor pertanian ini merupakan sektor andalan dalam menyerap tenaga kerja, tetapi dari tahun ke tahun jumlahnya cenderung menurun. Sedangkan kategori lapangan usaha utama penyerap tenaga kerja terbesar lainnya yaitu kategori jasa mengalami peningkatan pada tahun 2021.

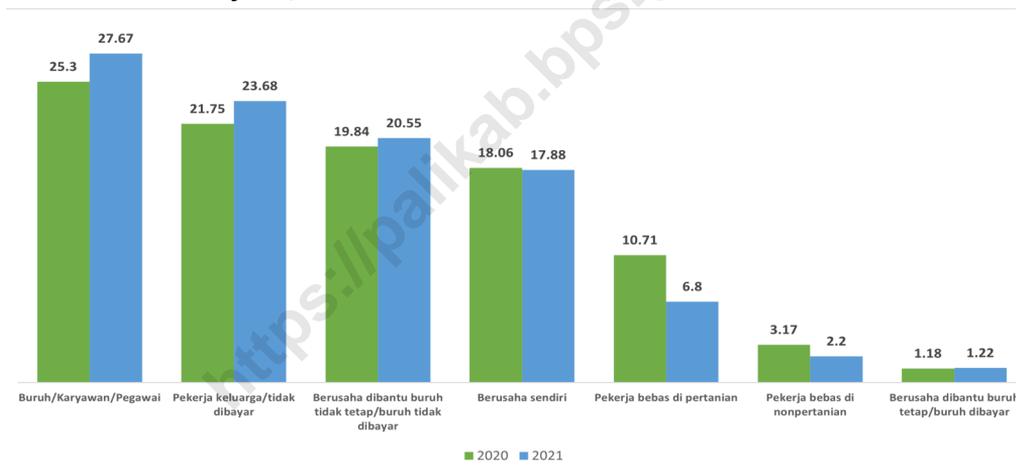
Gambar 5.4 Komposisi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama, 2019 - 2021



Sumber: Buku Saku Data Indikator Sosial Provinsi Sumatera Selatan 2017-2021

Untuk komposisi pekerja menurut status pekerjaan (gambar 5.5), Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada Agustus 2021 terjadi peningkatan persentase hampir di seluruh status pekerjaan. Hal ini bisa jadi akibat dari kondisi ketenagakerjaan yang mulai berangsur pulih setelah sebelumnya terdampak pandemi Covid-19. Hanya ada dua status pekerjaan, yakni pekerja bebas, baik sektor pertanian dan non pertanian yang mengalami penurunan pada tahun 2021

Gambar 5.5. Komposisi Penduduk Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan, 2020 dan 2021

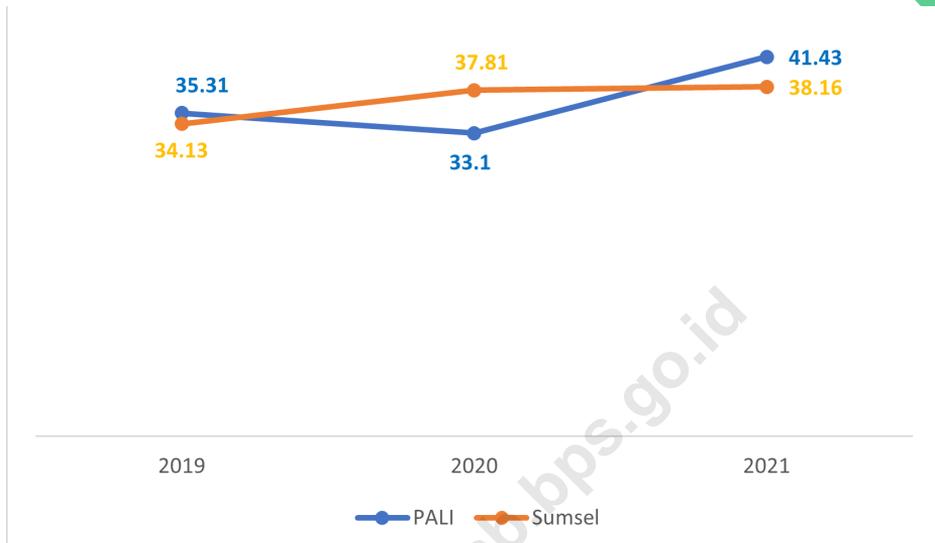


Sumber: Buku Saku Data Indikator Sosial Provinsi Sumatera Selatan 2017-2021

SETENGAH PENGANGGURAN

Masalah ketenagakerjaan lain yang perlu mendapat perhatian di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah masalah setengah pengangguran. Seseorang dikategorikan dalam setengah pengangguran jika jam kerja kurang dari 35 jam seminggu. Indikator setengah pengangguran ini menggambarkan produktifitas tenaga kerja. Tingkat setengah pengangguran Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir cenderung berada di bawah setengah pengangguran provinsi, kecuali pada tahun 2020. Pada Agustus 2020 Setengah pengangguran mengalami kenaikan tajam akibat pandemi Covid-19.

Gambar 5.6 Setengah Pengangguran Sumatera Selatan dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 2019 - 2021



Sumber: Situasi Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan, 2019-2021



53,50 persen pengeluaran penduduk digunakan untuk Komoditi Makanan

Konsumsi protein penduduk per kapita per hari yakni **56,73** gram

Badan Pusat Statistik, 2021

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator sosial ekonomi rumah tangga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga dikatakan sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk bukan makanan.

PENGELUARAN RUMAH TANGGA

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapat seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 6.1 memperlihatkan bahwa pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan menurun menjadi Rp. 816.788, di tahun 2021 dari Rp. 844.245,- di tahun 2020. Persentase pengeluaran untuk makanan memperlihatkan adanya peningkatan, yaitu

BAB VI

TARAF DAN POLA KONSUMSI

Tabel 6.1. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran, 2020 - 2021

Jenis Pengeluaran	Nominal (Rp)		Persentase	
	2019	2020	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	450 247	436 970	53,33	53,50
Bukan Makanan	393 998	379 818	46,67	46,50
Jumlah	844 245	816 788	100,00	100,00

Sumber: Susenas Maret, 2020- 2021

dari 53,33 persen menjadi 53,50 persen pada tahun 2021. Namun sebaliknya persentase untuk pengeluaran bukan makanan menurun dari 46,67 persen pada tahun 2020 menjadi 46,50 persen pada tahun 2021.

Menurut teori konsumsi, pendapatan yang dibelanjakan dibedakan menjadi dua. Pertama, pengeluaran yang bertujuan memenuhi kebutuhan atau untuk konsumsi baik barang ataupun jasa oleh rumah tangga, dan yang kedua disimpan sebagai investasi atau ditabung sehingga dapat dibelanjakan di masa mendatang. Meskipun sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, persentase pengeluaran penduduk tetap mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan pada masyarakat.

Untuk melihat tingkat ketimpangan pendapatan penduduk digunakan kriteria ketimpangan dari Bank Dunia, yaitu dengan melihat persentase pengeluaran yang mampu dibelanjakan oleh kelompok 40 persen penduduk yang berpendapatan paling rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang, dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Disamping kriteria yang ditetapkan Bank Dunia ada indikator lain yang juga sering digunakan yaitu Indeks Rasio.

Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase penduduk berpendapatan tinggi yang semula sebesar 40,30 persen pada tahun 2019 mening-

kat menjadi 41,51 persen pada tahun 2021. Selama periode 2019-2021, nilai Gini Ratio cenderung mengalami kenaikan. Ketika tahun 2019 mencapai angka sebesar 0,321. Sedangkan di tahun 2021 meningkat menjadi 0,331 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini berarti hingga tahun 2021 ketimpangan masyarakat mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Selain itu, berdasarkan data Susenas, pada Tabel 6.2 menunjukkan bahwa selama periode tahun 2019 sampai 2021 pada semua kelas penduduk yang berpendapatan rendah dan sedang cenderung menurun setiap tahunnya, namun meningkat untuk kelas penduduk yang berpendapatan tinggi. Kelas 40 persen penduduk berpendapatan paling rendah tercatat menurun menjadi 19,90 persen pada tahun 2019, kelas 40 persen menengah juga mengalami penurunan, sementara 20 persen tertinggi mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Keadaan ini menggambarkan bahwa adanya perbaikan dengan persentase kelas 40 persen penduduk berpendapatan rendah yang jumlahnya berkurang dari tahun sebelumnya.

Tabel 6.2. Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita dan Indeks Gini, 2019-2021

Tahun	40% Terendah	40% Menengah	20% Tertinggi	Indeks Gini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2019	20,28	39,43	40,30	0,321
2020	19,90	39,00	41,11	0.332
2021	20,07	38,43	41,51	0.331

Sumber: Buku Saku Data Indikator Sosial Provinsi Sumatera Selatan 2017-2021

Konsumsi Protein dan Kalori

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2012), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2150 kkal dan 57 gram protein.

Rata-rata konsumsi kalori masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2021 sebanyak 2.177,80 kkal atau meningkat sebesar 50,29 kkal dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 2.127,51 kkal. Hal ini juga berarti konsumsi kalori per hari masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2021 sudah memenuhi syarat dari sisi konsumsi kalori per hari sesuai standar yang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia adalah 2.150 kkal dan 57 gram protein. Meskipun begitu, konsumsi kalori masyarakat dapat dikatakan cenderung menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 2224,33 kkal. Seperti halnya konsumsi kalori, rata-rata konsumsi protein per kapita juga cenderung mengalami penurunan yaitu dari

Tabel 6.3. Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari, 2019-2021

Tahun	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Kalori (kkal)	2 224,33	2 127,51	2 177,80
Protein (gram)	59,87	56,65	56,73

Sumber: Buku Saku Data Indikator Sosial Provinsi Sumatera Selatan 2017-2021

59,87 gram pada tahun 2019 menjadi 56,73 gram pada tahun 2021, yang berarti juga masih dibawah ketentuan atau batas kecukupan gizi yang direkomendasikan.

Perubahan sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat dapat mengubah pola konsumsi masyarakat, dimana pola konsumsi merupakan salah satu indikator sosial ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat. Budaya dan perilaku lingkungan akan membentuk pola kebiasaan tertentu pada kelompok masyarakat. Data pengeluaran dapat mengungkapkan pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk.

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan keadaan kesejahteraan penduduk adalah dengan melihat pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan non makanan. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran makanan ke pengeluaran non makanan. Pergeseran pola pengeluaran dari makanan ke non makanan ter-

BAB VI

TARAF DAN POLA KONSUMSI

jadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya permintaan terhadap barang non makanan pada umumnya tinggi.

Dari segi budaya, pergeseran ini dikhawatirkan menjadi pertanda bahwa masyarakat semakin menyukai hal-hal yang bersifat instan dan praktis. Selain itu, dari segi keamanan pangan, ada beberapa isu yang harus menjadi perhatian. Makanan jadi banyak digemari karena kepraktisannya. Namun di sisi lain teknologi pangan akan menyebabkan semakin tumbuhnya kekhawatiran akan tingginya resiko tidak aman bagi makanan yang dikonsumsi.

Jumlah dan persentase penduduk miskin adalah salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan rakyat. Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan pendapatan penduduk yang meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin memberi indikasi menurunnya pendapatan penduduk.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup pembelian untuk makanan dan bukan makanan (barang dan jasa) di dalam negeri maupun luar negeri.



94,39 persen Penduduk Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir sudah memiliki rumah sendiri

24,84 persen sumber air minum masyarakat
menggunakan air kemasan dan ledeng

Badan Pusat Statistik, 2021

Kebutuhan mendasar manusia berupa pangan, sandang, dan papan. Rumah yang menjadi salah satu kebutuhan dasar (*basic needs*) manusia sekaligus sebagai salah faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah tinggal selain sebagai tempat tinggal juga berfungsi sebagai tempat pusat pendidikan, pembinaan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang karena dari rumahlah bermula aktivitas seseorang. Terwujudnya kesejahteraan penduduk akan ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan tempat tinggal dan lingkungan yang sehat, tenang, dan nyaman.

Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Bagi warga negara Indonesia, rumah adalah salah satu hak dasar rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28H bahwa setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman menjadi salah satu dimensi pembangunan manusia salah satu dimensi pembangunan manusia yang termuat dalam strategi pembangunan nasional tahun 2015-2019.

Rumah selain sebagai tempat tinggal juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas atau kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang maka semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik. Salah satu fasilitas perumahan yang dapat mencerminkan kesejahteraan adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan.

Selain itu, juga memenuhi fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya. Rumah selain menjadi simbol status sosial ekonomi seseorang, juga berperan membentuk watak, akhlak agar menjadi manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif.

Salah satu kualitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah adalah kualitas material seperti jenis lantai, dinding, dan atap yang memenuhi syarat. Rumah tinggal dikategorikan sebagai rumah layak huni apabila sudah memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tinggal tersebut serta luas lantai yang sebanding dengan banyaknya orang yang tinggal di dalamnya, termasuk fasilitas penerangan, air minum, dan tempat pembuangan akhir/tinja. Rumah dengan bangunan yang kualitasnya baik menjadi salah satu representasi mengenai kondisi ekonomi dan social penghuninya yang lebih baik dibandingkan mereka yang menempati bangunan tempat tinggal dengan kualitas bangunan yang rendah.

Pembangunan perumahan dan pemukiman memerlukan perencanaan monitoring, dan evaluasi secara periodik. Ketersediaan data terkait perumahan yang berkesinambungan sangat diperlukan guna menunjang pelaksanaan pembangunan perumahan dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan pemenuhan pengadaan perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan. Secara periodik, BPS telah melakukan pengumpulan data terkait dengan kondisi tempat tinggal atau rumah melalui Susenas KOR.

Kualitas Rumah Tinggal

Derajat kesejahteraan dan kesehatan rumah tangga juga bisa diukur dari kondisi fisik bangunan tempat tinggal. Rumah tinggal dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni apabila memenuhi beberapa kriteria

kualitas rumah tempat tinggal seperti memiliki beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal seperti memiliki lantai, dinding, dan atap yang memenuhi syarat serta mempunyai luas lantai yang mencukupi atau sebanding dengan banyaknya orang yang tinggal di dalamnya, termasuk fasilitas penerangan, air minum dan tempat pembuangan akhir/tinja. Sekain itu kualitas bangunan tempat tinggal dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi dari penghuninya. Rumah dengan bangunan yang kualitasnya baik tentunya kondisi ekonominya juga lebih baik dibandingkan mereka yang menempati rumah dengan kualitas bangunan yang rendah.

Jenis lantai tempat tinggal merupakan salah satu pengukuran. Jenis lantai yang ditempati rumah tangga memiliki relasi dengan kondisi ekonomi rumah tangga, terutama tingkat pendapatan dan pengeluaran

Tabel 7.1. Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 2019-2021

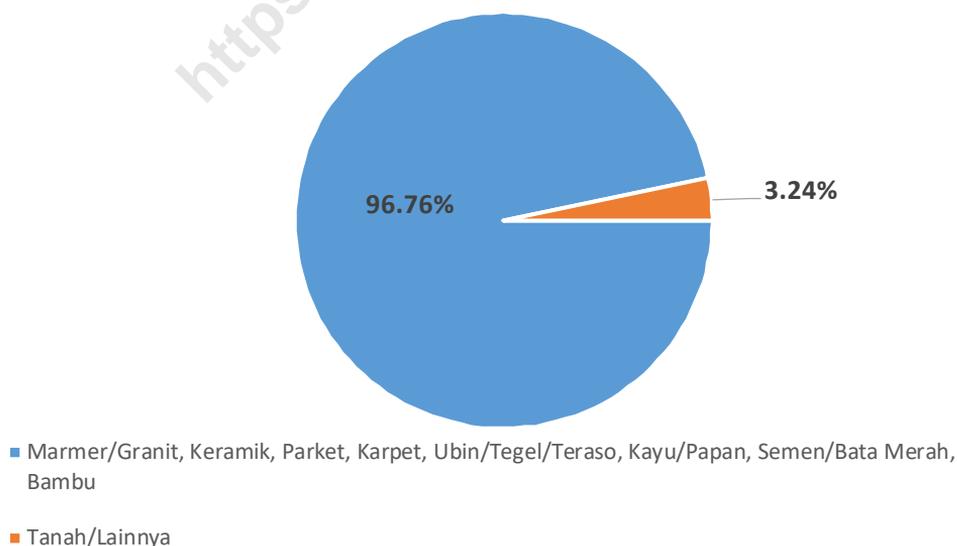
Indikator Kualitas Perumahan	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Lantai terluas bukan tanah (%)	98,54	98,48	96,76
Luas lantai per kapita <10 m ² (%)	36,33	33,82	23,95
Dinding Permanen (%)	99,37	99,59	100,00
Atap layak (%)	96,48	96,85	96,27

Sumber: Buku Saku Data Indikator Sosial Provinsi Sumatera Selatan 2017-2017

rumah tangga. Semakin baik kondisi ekonomi rumah tangga maka kondisi lantai rumah yang ditempati juga akan semakin berkualitas. Berdasarkan Susenas 2019 hingga 2021 di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, rumah tangga yang menggunakan lantai dari tanah mengalami peningkatan sebanyak 1,78 persen. Berdasarkan hasil Susenas bulan Maret 2021, sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau lebih dari 96 persen dari total rumah tangga menempati tempat tinggal dengan jenis lantai terluas terbuat bukan dari tanah dan lainnya. Data tersebut memberi gambaran bahwa mayoritas rumah tangga masyarakat disana telah menempati tempat tinggal dengan jenis lantai yang layak.

Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Dari

Gambar 7.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Tahun 2021



Sumber: Buku Saku Data Indikator Sosial Provinsi Sumatera Selatan 2017-2021

hasil Susenas 2021 rumah tinggal dengan atap beton, genteng, asbes, seng, dan sirap (bukan ijuk) mencapai 96,27 persen atau mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya (96,85 persen). Kondisi yang sama juga terjadi pada bangunan rumah tangga yang menggunakan dinding terluas bukan bambu/lainnya di Kabupaten ini semakin membaik, dikarenakan mengalami peningkatan dari 99,59 persen pada tahun 2020 menjadi 100 persen tahun 2021.

Tingkat kesehatan dan kenyamanan tempat tinggal juga sangat ditentukan oleh pemilihan jenis atap bangunan. Jenis atap bangunan tempat tinggal bisa merepresentasikan status sosial rumah tangga. Artinya, semakin baik kesejahteraan rumah tangga akan dicerminkan oleh jenis atap yang semakin berkualitas. Jenis atap terluas dari bangunan secara berjenjang dikategorikan menjadi beton, genteng, asbes, seng, bamboo, jerami, dan lainnya. Dari tabel 7.1 menunjukkan bahwa rumah tangga di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir lebih kurang 96 persen sudah menggunakan atap dengan bahan yang baik yaitu bukan jerami, ijuk, daun-daunan, rumbia, dan lainnya.

Secara kasar, fenomena-fenomena tersebut menggambarkan adanya peningkatan kualitas kesejahteraan penduduk dari sisi pendapatan sekaligus menggambarkan pengetahuan penduduk tentang tempat tinggal. Kemampuan masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah masih terbatas untuk membeli rumah yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur.

Fasilitas Rumah Tinggal

Suatu pemahaman mengenai rumah tinggal yang ideal selalu selalu mengalami perubahan dari masa ke masa. Adanya pergeseran pemahaman tersebut akibat adaptasi manusia data dari hasil survei rumah tangga Susenas. Pendekatan kedua menggunakan data jumlah sambungan dan konsumsi listrik rumah tangga menggunakan data

sekunder dari PLN. Indikator yang dihasilkan dari kedua pendekatan tersebut akan berbeda. Melalui pendekatan rumah tangga, data yang dikumpulkan akan menggambarkan berbagai jenis sumber penerangan yang digunakan oleh rumah tangga tanpa bisa melihat apakah jaringan atau instalasi listrik yang digunakan adalah meteran sendiri atau menggunakan meteran milik rumah tangga lain. Efeknya adalah penggunaan sumber penerangan dari listrik angkanya akan mendekati angka 100 persen.

Sementara data dari sumber PLN lebih menekankan ke aspek jaringan atau instalasi menurut jenis bangunan apakah tempat tinggal, tempat usaha, fasilitas sosial, kantor pemerintah, atau yang lainnya. Ukuran yang dihasilkan disebut rasio elektrifikasi yaitu rasio antara jumlah instalasi atau sambungan listrik ke konsumen rumah tangga dibagi dengan banyaknya bangunan yang ditempati oleh rumah tangga atau jumlah rumah tangga. Angka yang dihasilkan akan cenderung lebih rendah. Karena rumah tangga yang tidak memiliki meteran atau instalasi sendiri akan dianggap belum memiliki jaringan listrik.

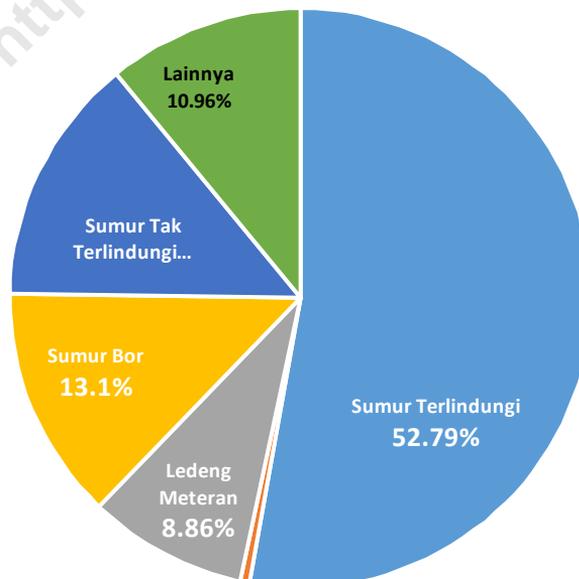
Kualitas kenyamanan rumah tinggal juga bisa diukur berdasarkan tingkat kesehatan dan fasilitas sanitasi. Salah satu ukuran yang digunakan adalah kemudahan untuk mengakses air bersih maupun cara mengaksesnya. Air yang layak digunakan rumah tangga sebagai sumber air minum maupun memasak menjadi aspek yang sangat penting dalam menopang kualitas kesehatan penduduk.

Air minum layak sesuai dengan metadata indikator TPB didefinisikan sebagai air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah, dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air isi ulang, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur

tidak terlindung, mata air tidak terlindung, dan air permukaan (seperti sungai, danau, waduk, kolam, atau irigasi). Definisi tersebut merupakan pendekatan untuk mengukur pencapaian target global memberikan akses air minum universal dan layak yang aman dan terjangkau bagi semua pada tahun 2030.

Pada tahun 2021 di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sudah 89,04 persen sudah menggunakan air bersih untuk mandi/cuci, baik itu berasal dari ledeng/pompa, sumur dan mata air, baik itu terlindung maupun tidak terlindungi serta sumur bor. Sedangkan sisanya sekitar hanya 11 persen masyarakat yang masih menggunakan sumber air lainnya untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi/cuci.

Gambar 7.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/Cuci, 2021



Sumber: Buku Saku Data Indikator Sosial Provinsi Sumatera Selatan 2017-2021

Air yang digunakan oleh rumah tangga untuk minum dan memasak bisa berasal dari beberapa sumber. Sumber air utama yang digunakan untuk minum bersumber dari air kemasan bermerek, air isi ulang, air ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung harus memenuhi syarat jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja minimal 10 meter.

Persentase masyarakat yang sudah menggunakan air minum berasal dari air minum kemasan dan leding cenderung mengalami penurunan antara tahun 2019 hingga tahun 2021. Dimana pada tahun 2019 persentase pengguna air minum tersebut sebesar 32,17 dan menurun menjadi 24,84 persen pada tahun 2021.

Tabel 7.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 2019-2021

Fasilitas Perumahan	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Jamban sendiri dengan tangki septik & SPAL (%)	85,40	88,38	87,17	
Air Minum Leding dan Kemasan (%)	32,17	31,46	24,84	
Air Bersih (%)	64,92	56,67	62,06	
Sumber Listrik	Penerangan	99,28	99,69	99,67

Sumber: Buku Saku Data Indikator Sosial Provinsi Sumatera Selatan 2017-2021

Status Tempat Tinggal

Status kepemilikan rumah tinggal merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat. Status kepemilikan rumah tinggal sangat dipengaruhi kondisi ekonomi rumah tangga. Rumah tangga menengah ke atas akan menempati rumah milik sendiri atau dengan kata lain dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan rumah tangga dalam jangka panjang karena kebutuhan dasar berupa tempat tinggal sudah terjamin. Selain status kepemilikan rumah tinggal lainnya adalah kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua atau saudara, atau status rumah kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil Susenas 2021, rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 94,39 persen, sisanya 5,61 persen adalah bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari 4,13 persen bebas sewa, 1,36 persen kontrak atau sewa dan menempati rumah dinas atau lainnya sebesar 0,11 persen.

Tabel 7.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 2019—2021

Status Kepemilikan Rumah	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Milik Sendiri	89,02	88,66	94,39
Kontrak, Sewa, Bebas Sewa, Rumah Dinas	10,82	10,28	5,49
Lainnya	0,16	1,06	0,11

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan, 2019-2021



11,76 persen Penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berada di garis kemiskinan

Garis kemiskinan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mencapai **459** Ribu Rupiah/Kapita/Bulan

Badan Pusat Statistik, 2022

Kemiskinan telah menjadi isu kompleks dan multidimensial di seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Ya, kemiskinan bukan hanya sekedar berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi yang berada di bawah standar kesejahteraan terukur (kebutuhan garis kemiskinan), lebih jauh, kemiskinan juga berkaitan dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek di luar pendapatan (*non-income factors*) seperti akses kebutuhan minimum, kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi. Bahkan, kemiskinan juga berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat, dan karakter bangsa secara luas.

Persoalan kemiskinan menjadi persoalan seluruh negara di dunia sehingga upaya penanggulangannya pun perlu dilakukan dalam konteks global. *Millennium Development Goals (MDGs)* telah berhasil mengurangi penduduk miskin dunia hampir setengahnya. Selanjutnya, *Sustainable Development Goals (SDG's)* pun masih menempatkan pengentasan kemiskinan (*no poverty*) sebagai tujuan utama. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan dalam bentuk dan dimensi apapun menjadi komitmen seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia.

Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir hingga tahun 2022 cenderung menurun meskipun mengalami fluktuasi di beberapa periode waktu. Seperti pada tahun 2020, persentase penduduk miskin menurun menjadi 12,62 persen dan sedikit mengalami peningkatan menjadi 12,91 persen pada tahun 2021, namun Kembali menurun menjadi 11,76 persen di tahun 2022. Hal ini juga sesuai dengan jumlah penduduk miskin yang mencapai sekitar 23 ribu pada tahun 2022 dari sekitar 25 ribu di tahun 2019.

Upaya penanggulangan kemiskinan secara nasional sudah dilakukan

BAB VIII

KEMISKINAN

sejak awal kemerdekaan dengan berbagai pendekatan dan kebijakan. Sebagaimana amanat konstitusi demi terciptanya masyarakat adil dan makmur, program-program pembangunan yang telah terlaksana juga selalu memberikan perhatian besar dalam pengentasan kemiskinan. Sejalan dengan itu, pembangunan yang terjadi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pun bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berbicara tentang kemiskinan, tentu tidak luput dari garis kemiskinan (GK) sebagai ukuran yang digunakan BPS untuk menentukan seseorang tergolong miskin atau tidak. GK dibentuk dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKSM), GK senantiasa mengalami peningkatan setiap tahun mengikuti kenaikan harga kebutuhan makanan dan bukan makanan. Tahun 2022, GK Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menjadi Rp 458.746. Keadaan tersebut menggambarkan GK mengalami peningkatan sebesar 5,37 persen atau sebesar Rp 23.367 perkapita per bulan.

Tabel 8.1. Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 2019-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)
2019	25	13,47
2020	24	12,62
2021	25	12,91
2022	23	11,76

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Persoalan kemiskinan tidak hanya seputar jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Secara umum, indeks P1 pada periode 2018-2022 cenderung menurun. Indeks P1 cenderung menurun dalam dua tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1,86 di tahun 2019 dan 1,40 di tahun 2020. Namun Kembali mengalami kenaikan menjadi 1,84 di tahun 2021. Setelah itu, kembali menurun menjadi 1,5 pada tahun 2022. Demikian pula dengan indeks P2 yang sejalan dengan penurunan indeks P1, yaitu sebesar 0,61 di tahun 2018 menjadi 0,23 di tahun 2020, namun kembali naik di tahun 2021 sebesar 0,47. Meskipun begitu, pada tahun 2022, indeksnya kembali turun menjadi 0,32. Hal ini tentu saja tidak lepas dari pemulihan akan dampak pandemi terhadap ekonomi masyarakat yang masih berlangsung hingga saat ini.

Secara umum, menurunnya nilai P1 dan P2 tahun 2022 di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga cenderung mengalami penurunan.

Tabel 8.2. Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 2018-2022

Tahun	Garis		
	Kemiskinan (Rupiah/Kapita/ Bulan)	Indeks Kedalaman (P1)	Indeks Keparahan (P2)
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	377 160	2,24	0,61
2019	388 208	1,86	0,37
2020	412 236	1,40	0,23
2021	435 379	1,84	0,47
2022	458 746	1,50	0,32

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

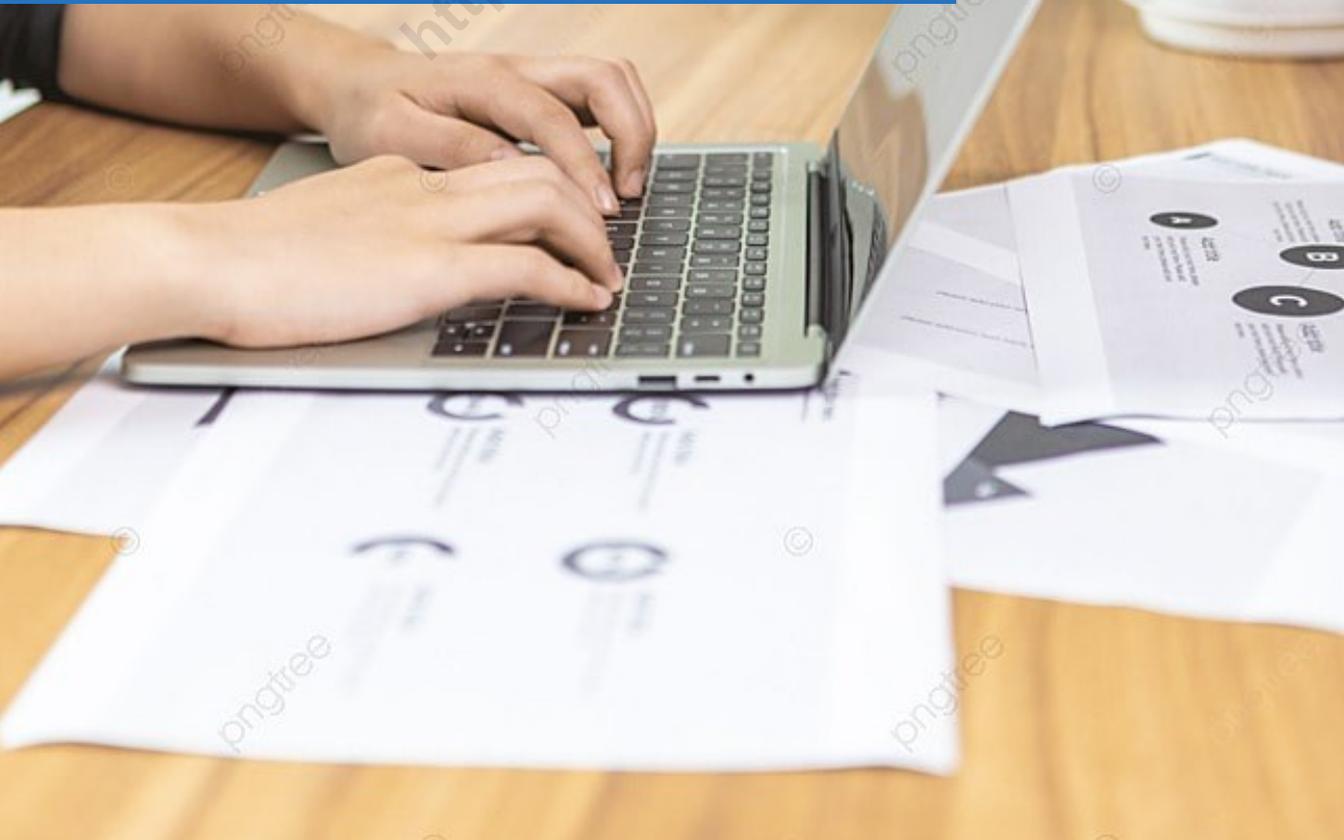
9

SOSIAL LAINNYA

85,49 persen Penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memiliki jaminan kesehatan gratis

45,36 persen Penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sudah mengakses Internet

Badan Pusat Statistik, 2021



Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan manusia. Akses informasi dan komunikasi melalui internet dan *smartphone* menjadi “candu” baru dan menyebabkan pergeseran gaya hidup sebagian besar masyarakat.

Perkembangan dunia digital mampu menciptakan kesempatan bagi setiap negara untuk mengembangkan perekonomian. Akses yang cepat dan mudah juga menciptakan ruang dan peluang yang lebih luas bagi setiap wilayah untuk meningkatkan keunggulan komparatifnya. Hal tersebut tentu saja memiliki imbas terhadap kondisi social dan ekonomi yang lebih luas.

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terus mengalami peningkatan perekonomian sejak tahun 2016 setelah sebelumnya mengalami perlambatan. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebesar 5,97 persen di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi sebesar 5,51 persen. Selanjutnya, di tahun 2018, pertumbuhan ekonomi kabupaten tumbuh sebesar 6,38 persen di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 6,01 persen. Namun pada tahun 2019 hingga tahun 2020, pertumbuhan ekonomi cenderung melambat dikarenakan pandemi, hingga kembali bertumbuh pada tahun 2021.

Kemajuan perekonomian yang dialami kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir seharusnya berdampak positif terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Selain dari indikator sosial strategis seperti kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan dan perumahan, indikator social lainnya pun tak luput dari dampak ekonomi yang ada.

Penerima Kredit Usaha

Setelah sempat turun di tahun 2018, persentase rumah tangga yang menerima kredit usaha di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kembali meningkat di tahun 2019, dan terus berlanjut di tahun 2021. Pada tahun 2018, persentase rumah tangga yang memperoleh kredit usaha turun menjadi 9,4 persen, dan kembali meningkat di tahun 2019 menjadi 13,77

persen dan tetap meningkat hingga di tahun 2021 menjadi sebesar 19,67 persen.

Kredit usaha sangat bermanfaat terutama bagi rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro. Kenaikan signifikan persentase rumah tangga yang menerima kredit usaha menggambarkan tingginya antusiasme masyarakat dalam memperoleh kredit usaha dan mengembangkan usahanya.

Pelayanan Kesehatan

Peningkatan pelayanan kesehatan menjadi sebuah tujuan dari pembangunan masyarakat secara menyeluruh. Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.

Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. Semakin banyak masyarakat yang mendapat jaminan pelayanan kesehatan, maka dapat dipastikan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2021, persentase penduduk yang memiliki jaminan/asuransi kesehatan gratis dari pemerintah adalah sebesar 85,49 persen. Tentu hal tersebut menunjukkan semakin banyak penduduk yang memperoleh pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Namun demikian, peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang memanfaatkan jaminan/asuransi kesehatan harus tetap menjadi perhatian bersama, khususnya bagi pemerintah daerah terkait.

Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi

Salah satu tantangan sekaligus peluang di era teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini adalah pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur yang menunjang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri. Hal ini karena potensi TIK jika dikembangkan secara tepat dan optimal, akan memberikan dampak positif yang cepat dan signifikan terhadap pembangunan suatu wilayah. Kemajuan tersebut tidak hanya dari aspek ekonomi melainkan berdampak pula pada pembangunan masyarakat.

Saat ini dengan perkembangan TIK, masyarakat secara umum mendapat berbagai kemudahan. Aplikasi berbasis online memberikan kesempatan pada masyarakat luas untuk aktif berperan dalam perekonomian sebagai subjek maupun objek. Terbukanya lapangan kerja baru dan industri kreatif menciptakan sebuah pasar tersendiri bagi kalangan pelaku usaha. Semakin banyak penduduk yang mampu mengakses TIK maka dipastikan peluang mendapat kesejahteraan yang lebih baik semakin terbuka.

Di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, perkembangan TIK telah mulai dirasakan masyarakat. Dari tahun ke tahun akses masyarakat terhadap TIK cenderung meningkat, namun menurun hingga tahun 2021. Pada tahun 2021, sekitar 6,55 persen rumah tangga di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memiliki komputer.

Selain kepemilikan komputer, kepemilikan telepon seluler pun meningkat dan menggeser penggunaan telepon rumah yang terus menurun. Penggunaan telepon rumah berkurang dari 0,20 persen di tahun 2017 menjadi hampir tidak ada hingga pada 2021. Tiap tahunnya terjadi penurunan penggunaan telepon rumah karena masyarakat beralih menggunakan telepon seluler. Berdasarkan data tahun 2021, 45,36 persen masyarakat yang berumur 5 tahun keatas telah mengakses internet.

BAB IX

SOSIAL LAINNYA

Gambar 9.1 Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet, 2019-2021



Sumber: Buku Saku Data Indikator Sosial Provinsi Sumatera Selatan 2017-2021

DAFTAR PUSTAKA

- _____ 2022. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Dalam Angka. BPS Kabupaten Muara Enim
- _____ 2021. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Dalam Angka. BPS Kabupaten Muara Enim
- _____ 2020. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Dalam Angka. BPS Kabupaten Muara Enim
- _____ 2019. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Dalam Angka. BPS Kabupaten Muara Enim
- _____ 2021. Statistik Kesejahteraan Rakyat. BPS Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- _____ 2020. Statistik Kesejahteraan Rakyat. BPS Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- _____ 2019. Statistik Kesejahteraan Rakyat. BPS Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- _____ 2021. Ikhtisar data Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- _____ 2020. Ikhtisar data Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- _____ 2021. Ikhtisar data Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- _____ 2020. Ikhtisar data Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- _____ 2019. Ikhtisar data Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- _____ 2017-2021. Buku Saku Data dan Indikator Sosial Provinsi Sumatera Selatan

LAMPIRAN

<https://palitka.bps.go.id>

Lampiran 1. Jumlah penduduk kabupaten/kota di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 2017-2021 (Ribu Jiwa)

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Talang Ubi	76,96	78,26	79,55	83,67	85,13
2	Tanah Abang	29,21	29,47	29,72	30,58	30,80
3	Abab	26,78	27,27	27,75	27,06	27,36
4	Penukal	28,37	28,57	28,73	30,18	30,39
5	Penukal Utara	23,33	23,68	24,01	23,42	23,60
	PALI	184,67	187,28	189,76	194,90	197,29

LAMPIRAN

Lampiran 2. Kepadatan penduduk kabupaten/kota di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 2017-2021

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Talang Ubi	119	121	123	129	131
Tanah Abang	187	188	190	195	197
Abab	77	79	80	65	66
Penukal	104	105	106	111	112
Penukal Utara	56	57	58	67	68
PALI	100	102	103	106	107

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MUARA ENIM**

Jalan Bambang Utoyo No, 44, Muara Enim 31314

Telp. : 0734-421088 Fax.: 0734-421088

Homepage : <http://muaraenimkab.bps.go.id>

E-mail : bps1603@bps.go.id

ISSN 2797-3050

